



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI TERHADAP PENGGUNAAN APBD KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2021

Bayu Anshori¹⁾, Rahmat²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : Bayuansori0@gmail.com, rahmathidayah2585@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Perakilan Rakyat Daerah mempunyai peran legislatif. Legislatif merupakan lembaga yang mempunyai wewenang serta tugas dalam pembuatan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah kabupaten/kota merupakan badan perwakilan rakyat wilayah yang berfungsi selaku faktor penyelenggara pemerintahan wilayah kabupaten/kota. Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah sangat memastikan arah para pembentuk kebijakan, yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Pelaksanaan pada anggaran yang terdapat pada tahun 2021 merupakan anggaran yang harus terus dikembangkan Karena indikator pencapaian tahun sebelumnya merupakan koreksi untuk tahun anggaran berikutnya dalam pengembangan pembangunan di kota Tanjungbalai sebagai pertimbangan. Oleh sebab itu, dalam perihal ini kebijakan yang diatur dalam peraturan wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penuntut Pengguna Anggaran Dalam Penerapan APBD merupakan pejabat yang berwenang melakukan sebagian atribusi pengguna anggaran dalam penerapan sebagian tugas serta guna Fitur Wilayah. Berfungsi selaku Kepala Satuan Kerja K/L ataupun Kepala Satuan Kerja SKPD, mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangan serta jadi pelakon pembelian Dalam kedudukan manajerial, bisa memakai sumber energi organisasi buat menggapai tujuan organisasi dalam melaksanakan kedudukan pendelegasian serta mandat cocok syarat Per UU pemerintahan di wilayah, memiliki tugas serta wewenang yang bertepatan selaku PPK. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran DPRD terhadap pelaksanaan pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Tanjungbalai serta upaya-upaya apa yang dilakukan DPRD Kota Tanjungbalai untuk mengawasi pengguna Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah di Kota Tanjungbalai. Sejauh ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penatausahaan APBD Kota Tanjungbalai maka dapat dipastikan pengelolaan keuangan di Kota Tanjungbalai dapat dialokasikan sebaik mungkin.

Kata Kunci : Penggunaan, Anggaran, APBD

Abstract

The Regional People's Assembly Council has a legislative role. The legislature is an institution that has the authority and duties in making laws. The Regency/Municipal Regional People's Legislative Council is a regional people's representative body that functions as a factor in administering district/city regional government. The Regional People's Representative Council really ensures the direction of policy makers, who have legislative, budgetary and oversight functions. Implementation of the existing budget in 2021 is a budget that must continue to be developed because the previous year's achievement indicator is a correction for the next budget year in the development of development in the city of Tanjungbalai as a

consideration. Therefore, in this matter the policies stipulated in the regulations must be implemented as well as possible. Prosecutors of Budget Users in the Implementation of APBD are officials who have the authority to make some attributions of budget users in implementing some of the tasks and for Regional Features. Serves as Head of K/L Work Unit or Head of SKPD Work Unit, has authority over financial management and acts as a purchasing actor. In managerial positions, can use organizational resources to achieve organizational goals in carrying out delegation and mandate positions according to the requirements of Per regional government laws, has the same duties and authorities as PPK. The purpose of writing this article is to find out the role of the DPRD in implementing the users of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the City of Tanjungbalai and what efforts have been made by the DPRD of the City of Tanjungbalai to oversee the users of the regional Budget and Expenditure Revenue in the City of Tanjungbalai. So far the research method used is empirical legal research. Administration of Tanjungbalai City APBD, it can be ensured that financial management in Tanjungbalai City can be allocated as well as possible.

Keywords: *Usage, Budget, APBD*

A. Pendahuluan

Dewan Perakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas untuk melakukan legislasi anggaran, serta pengawasan dalam merumuskan permasalahan skala prioritas pembangunan serta kebutuhan wilayah dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, pembuatan kebijakan partisipatif pula bisa digunakan untuk mengukur sepanjang mana warga ataupun pemangku kepentingan di wilayah bisa mengakses ataupun ikut serta dalam sesuatu mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya kebijakan alokasi anggaran warga.¹

Adapun di dalam melakukan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap penyelenggaraannya dapat harus menggunakan dana yang dihimpun di bank.²

Wilayah negara Indonesia selain dikenal sebagai negara yang subur,

dimana juga Indonesia terkenal akan potensi pariwisatanya yang baik, mulai wisata yang berada di daratan hingga wisata yang berada di perairan lautnya, sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya warga negara asing untuk berlomba-lomba untuk datang dan berkunjung ke Indonesia, dengan tujuan untuk melihat keindahan alam yang Indonesia miliki.³

Indonesia ialah negara yang sangat menjunjung besar nilai-nilai hukum dalam kehidupan warga yang tercantum di dalamnya, karena untuk kepentingan kehidupan yang menguntungkan dalam kehidupan warga, perihal inilah yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kalau negara Indonesia merupakan negara hukum”.⁴

¹ Rispa Ngindana, dkk, *APBD Partisipatif Sebuah Harapan Yang Terabaikan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm 6

² Abdul Gani, Indra Perdana, (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*, hlm. 3

³ Arfian Fahreza, Ismail, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 3, No. 1 November 2021), hlm. 1

⁴ Ridwan Saragih, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 3

Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota, seluruhnya bertugas mengurus kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia.⁵ Permasalahan tanah ialah permasalahan yang nyaris susah dipecahkan, sebab berkaitan dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai watak yang melambangkan nilai kebaikan.⁶

Kebijakan yang mengendalikan pada hakekatnya ialah instrumen politik yang digunakan selaku perlengkapan buat tingkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan penduduk wilayah.⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, DPR serta DPRD bersama mempunyai hak, tercantum hak anggaran. Memandang beratnya tugas melaksanakan guna legislasi, hingga DPR serta DPRD wajib betul-betul bisa berfungsi dalam melakukan haknya dengan baik, penuh tugasnya secara sepadan. Perihal ini cuma bisa dilaksanakan dengan baik bila tiap anggota legislatif tidak cuma cakap dalam bidang politik, namun pula mempunyai pengetahuan yang lumayan dalam perihal konsepsi serta metode penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja legislatif, kebijakan publik, teknis pengawasan,

anggaran serta sebagainya.⁸ Hak unjuk rasa merupakan hak DPRD Kabupaten/DPRD Kota untuk melaporkan pendapatnya atas kebijakan Bupati/Walikota ataupun atas peristiwa luar biasa yang terjalin di wilayah diiringi dengan saran penyelesaian ataupun tindak lanjut penerapan hak interpelasi.⁹

Pengawasan pengelolaan APBD oleh DPRD sangat menekan karena APBD ialah aspek berarti dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di sesuatu wilayah bersumber pada otonomi yang nyata, luas serta bertanggung jawab. Peranan pemasukan asli wilayah dalam pembiayaan wilayah ialah salah satu acuan berarti dalam penerapan otonomi wilayah, dalam makna terus menjadi banyak sesuatu wilayah mendapatkan serta mengumpulkan pemasukan asli wilayah, hingga terus menjadi besar jumlah dana wilayah yang ada yang bisa digunakan buat implementasi keuangan dari otonomi wilayah.¹⁰

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari suatu kendalakendala yang bisa saja terjadi dalam penerapannya. Sehingga dalam hal

⁵ Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

⁶ Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi (2019). *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai)*. 1(1), hlm. 4

⁷ Septi Rindawati, *Responsibilitas Pengelolaan APBD*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm 1

⁸ Giant Permana, *Peran Dprd Kota Semarang Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hlm 2

⁹ Pasal 371, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁰ Mushafi, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Hukum*, file:///D:/File%20downloads%20sis/2022-4552-1-SM.pdf, diakses pada 2 April 2022

ini tentu selalu pemerintah dalam meluncurkan suatu programnya yang berhubungan dengan anak tentulah tidak terlepas dari dukungan masyarakat.¹¹

Bagi Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, realisasi pemasukan serta belanja Wilayah Otonomi Kota Tanjungbalai tahun 2021, jumlah sasaran pemasukan menggapai Rp. 633.342,67, sebaliknya yang terealisasi merupakan Rp. 579.857,65. Beban yang terkategori beban tidak langsung menggapai sasaran sebesar Rp.364.591,93 sebaliknya yang dikeluarkan sebesar Rp.325.161,36. Sasaran belanja langsung merupakan Rp. 281.431,95 yang terealisasi Rp.218.512,01, total menggapai sasaran Rp. 646.023,88 sebaliknya realisasi belanja Rp. 543.673,37. Dari sisi pembiayaan ada pemasukan wilayah sebesar Rp. 15.981,20 sebaliknya sasaran belanja sebesar Rp. 3.300,00 yang terealisasi sebesar Rp. 3.300,00. Pembiayaan bersih Rp. 12 681,20.¹²

Penuntut Pengguna Anggaran Dalam Penerapan APBD merupakan pejabat yang berwenang melakukan sebagian atribusi pengguna anggaran dalam penerapan sebagian tugas serta guna Fitur Wilayah. Berfungsi selaku Kepala Satuan Kerja K/ L ataupun Kepala Satuan Kerja SKPD, mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangan

¹¹ Rera Asnelly, Junindra Martua, *Efektivitas Pencatatan Identitas Anak Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai*, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 1

¹² Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, *Kota Tanjung Balai Dalam Angka 2022*, (Tanjungbalai: Rilis Grafika, 2022), hlm 59

serta jadi pelakon pembelian Dalam kedudukan manajerial, bisa memakai sumber energi organisasi buat menggapai tujuan organisasi Dikala melaksanakan kedudukan pendelegasian serta mandat cocok syarat peraturan perundang-undangan pemerintahan di wilayah, memiliki tugas serta wewenang yang bertepatan selaku PPK¹³

Sehubungan dengan uraian latar balik yang sudah dijabarkan di atas, hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset dengan judul tersebut **“Peran DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai”**

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini.¹⁴ Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kantor DPRD Kota Tanjung Balai.

C. Hasil Dan Pembahasan

¹³ Fahrurrazi, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, <https://biropbj.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/PAPARAN-PA-KPA-dan-PPK-dalam-Perpres-12-Th-2021-Fahrurrazi.pdf>, diakses pada 03 Maret 2022

¹⁴ Emiel Salim Siregar, Jurnal : *Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14.

1. Peran DPRD Terhadap Pelaksanaan Pengguna Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Tanjungbalai

Dengan pengelolaan APBD di Kota Tanjungbalai ialah bagian dari pengelolaan keuangan wilayah. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah di Kota Tanjungbalai, butuh disusun lembar pertanggungjawaban penerapan APBD tahun 2021 yang wajib dimaknai selaku bagian dari pengelolaan keuangan wilayah sekalian bagian dari proses anggaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban penerapan APBD ialah bentuk kewajiban pemerintah wilayah buat menyelenggarakan pengelolaan keuangan wilayah secara tertib, cocok dengan peraturan perundang-undangan, secara efektif, murah, selektif serta transparan, dengan senantiasa mencermati rasa keadilan serta kesesuaian.¹⁵

Ada pula kewenangan DPRD Kota Tanjungbalai, apabila pada dikala merancang pengelolaan APBD tahun 2021 butuh terlebih dulu menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 jo. 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.¹⁶

Ada pula DPRD Kota Tanjungbalai dalam menyusun pertanggungjawaban anggaran upaya dini pengelolaan APBD

sudah berupaya melaksanakan gunanya cocok dengan syarat yang berlaku.¹⁷

Bersumber pada hasil wawancara dengan Usni Syahzuddin, S.Sos. sebagai Sekretaris DPRD Kota Tanjungbalai yang membidangi Tugas Bidang Perekonomian serta Keuangan dalam perihal ini menarangkan kalau tiap tahun sudah diterapkan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan APBD tahun 2021.¹⁸

Sistem akuntabilitas pengelolaan APBD tahun 2019 dalam perihal ini mempunyai konsep bawah yang sudah mempunyai ketentuan serta syarat yang jelas, baik dalam perihal pelaporan keuangan, ataupun pengawasan serta pemakaian laporan keuangan. Bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur, pembedahan, perlengkapan, serta elemen lain yang sistematis buat melaksanakan guna akuntansi, mulai dari analisis transaksi sampai pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah.¹⁹

Sebaliknya Peraturan Pemerintah, wajib mencerminkan ekuitas, maksudnya pemasukan serta beban diakui ataupun dicatat pada dikala transaksi terjalin, bukan pada dikala uang tunai buat transaksi tersebut diterima ataupun dibayarkan. Menimpa tugas DPRD Kota Tanjungbalai dalam pertanggungjawaban dalam proyek pengelolaan APBD Kota Tanjungbalai, cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan yang

¹⁵ Wawancara penulis dengan Usni Syahzuddin, S.Sos. selaku Sekretaris Dewan DPRD Kota Tanjungbalai, pada Tanggal 07 November 2022

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

berlaku.²⁰ Dalam perihal ini, aspek pendukung akuntabilitas dalam proses pengelolaan APBD di Kota Tanjungbalai ialah:

- a. Perencanaan;
- b. Peraturan;
- c. Sumber energi manusia;
- d. teknis; dan
- e. Koordinasi.²¹

Aspek pendukung yang lain merupakan SDM yang cocok dengan kedudukan serta gunanya sebab mempunyai disiplin ilmu dan pengawasan baik top down ataupun down top ialah aspek pendukung dalam pemakaian APBD di Kota Tanjungbalai.²²

Menimpa sasaran pemasukan Kota Tanjungbalai tahun 2021 yang diresmikan pada tahun 2021 diatur dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Rp. 739.197.242.646,00 terdiri dari pemasukan asli wilayah sebesar Rp. 106.497.522.458,00, Dana Saldo Rp. 575.157.355.000,00 serta pemasukan wilayah lain yang legal sebesar Rp. 57.542.365.188,00 dengan capaian selaku berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam perihal ini menimpa realisasi Pemasukan Asli Wilayah (PAD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021 hadapi penyusutan, sebab realisasi Pemasukan Asli Wilayah (PAD) Kota Tanjungbalai tahun 2021 sebesar Rp. 63.728.887.166,82 dari sasaran Rp. 106.497.522.458,00 yang terealisasi cuma 59,20%.

Berikutnya objek retribusi yang tidak menggapai sasaran merupakan Retribusi Persampahan/Kebersihan yang terealisasi sebesar 23,54 persen ataupun Rp. 805.864.523,05 dari sasaran yang dicapai sebesar Rp. 3.422.715.000,00. Perihal ini disebabkan perlengkapan penghancur sampah jadi kompos tidak bisa bekerja, sehingga diharapkan laju perlengkapan pengolahan sampah tidak bisa bekerja cocok harapan. Menimpa retribusi wilayah atas bayaran cetak peta buat penyediaan peta bawah, terealisasi sebesar 0,92% ataupun Rp. 17.100.000,00 dari Rp. 1.867.046.400,00. Sebaliknya penerimaan dari pemasukan asli wilayah yang lain baru menggapai 53,14%.²³

b. Pendapatan Dana Perimbangan

Opini wilayah Kota Tanjungbalai bersumber dari dana perimbangan di daerah Kota Tanjungbalai yang dalam perihal ini ditargetkan sebesar Rp. 575.157.355.000,00 serta terealisasi sebesar Rp. 547.449.083.975,00 ataupun 95,18%.

c. Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain

Penerimaan wilayah dari sumber lain yang ditunjukkan sebesar Rp. 57.542.365.188,00, dibayar Rp. 36.516.025.064 ataupun 63,46%. Sebaliknya buat penerimaan wilayah lain yang legal dari dana untuk hasil pajak Provinsi serta Pemerintah Wilayah yang lain ditargetkan sebesar Rp. 38.254.365.188,00 serta terealisasi Rp. 36.516.025.064 ataupun 95,46%.²⁴

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

Berikutnya terpaut permasalahan belanja wilayah Kota Tanjungbalai tahun 2021 ialah mengalokasikan dana dari Rp.868.435.559.646,00 dengan realisasi sebesar Rp. 667.207.447.546,55 ataupun 76,83% terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 330.064.222.276 ataupun 91,49% dari sasaran Rp. 335.268.379.545,00, serta bayaran langsung yang dikeluarkan sebesar Rp. 337.143.225.270,55 ataupun 66,41% dari sasaran Rp. 507.688.065.769, 00.²⁵

Capaian penerapan program serta aktivitas di bidang perpajakan terpaut pelayanan bawah di Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 yang dimaksudkan buat dilaksanakan merupakan selaku berikut:

- 1) Bidang Pendidikan
- 2) Bidang Kesehatan
- 3) Bidang Pekerjaan Universal serta Penyusunan Ruang
- 4) Bidang Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman
- 5) Ketenteraman serta Kedisiplinan Universal dan Proteksi Masyarakat
- 6) Bidang Sosial.²⁶

Oleh sebab itu, pada hal- hal yang bertabiat harus Pemerintah Wilayah Kota Tanjungbalai sudah membentuk APBD tahun 2021 cocok bidangnya ialah:

- 1) Bidang Pekerjaan
- 2) Bidang Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak
- 3) Bidang Pangan
- 4) Bidang Lingkungan
- 5) Bidang Administrasi Kependudukan serta Catatan Sipil

- 6) Bidang Pemberdayaan Warga serta Desa
- 7) Bidang Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana
- 8) Bidang Transportasi
- 9) Bidang Komunikasi serta IT
- 10) Bidang Koperasi serta Usaha Kecil Menengah (UKM)
- 11) Bidang Investasi
- 12) Bidang Pemuda serta Olahraga
- 13) Bidang Kebudayaan
- 14) Bidang Perpustakaan
- 15) Bidang File.²⁷

Dari segi opsi, Balai Kota Tanjungbalai membentuk APBD tahun 2019 cocok dengan wilayahnya, ialah:

- 1) Bidang Kelautan serta Perikanan
- 2) Zona Pariwisata
- 3) Bidang Pertanian
- 4) Zona Komersial
- 5) Zona Industri.²⁸

Dalam urusan pemerintahan, Pemkot Tanjungbalai membentuk APBD tahun 2021 cocok bidangnya, ialah:

- 1) Daerah Administrasi Pemerintahan
- 2) Bidang Pengawasan
- 3) Daerah Perencanaan
- 4) Bidang Keuangan
- 5) Bidang Personalia.²⁹

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan DPRD Kota Tanjungbalai Untuk Mengawasi Pengguna Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Di Kota Tanjungbalai

Dalam perihal ini hambatan kinerja keuangan Pemasukan Asli Wilayah atas

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

Realisasi Anggaran di Kota Tanjungbalai merupakan kerap kali laporan realisasi anggaran pada APBD Kota Tanjungbalai ada, tetapi petunjuk teknisnya kerap tertunda dari Pemerintah Pusat yang ialah salah satu hambatan dalam penerapan pengelolaan keuangan wilayah.³⁰

Fasilitas serta prasarana terhadap hambatan sumber energi yang kedua merupakan minimnya informasi infrastruktur bagian perencanaan. Infrastruktur yang kurang mencukupi pula jadi salah satu hambatan kinerja pelaporan realisasi anggaran di Kota Tanjungbalai, sebab hambatan jaringan internet buat melakukan program *E-Planning* yang diamanatkan Pemerintah Pusat.³¹

Dalam perihal ini, hambatan yang lain merupakan komunikasi, dimana koordinasi antar zona apalagi antar SKPD masih kurang. Konsistensi ataupun keseragaman langkah- langkah bawah serta tujuan butuh dikomunikasikan sehingga pelaksana mengenali dimensi serta tujuan kebijakan secara pas. Komunikasi dalam organisasi ialah proses yang sangat lingkungan serta rumit. Sumber data yang berbeda bisa memunculkan interpretasi yang berbeda. Supaya implementasi bisa dilaksanakan secara efisien, siapa juga yang bertanggung jawab buat menegakkan sesuatu keputusan wajib mengenali apakah sesuatu implementasi bisa dilaksanakan.³²

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

Keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak bisa menyajikan data yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil serta khasiat yang diperoleh dari sesuatu aktivitas. Sebab pada dasarnya anggaran ialah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas sesuatu organisasi.³³

Dari statment informan terpaut dengan teori melaporkan kalau dalam perencanaan serta penganggaran, serta dalam penerapan program/ aktivitas sebab keterbatasan anggaran, perihal ini tidak bisa terlaksana, terlebih dalam perihal penerapan *E-Planning* Musrenbang ada aktivitas yang tidak bisa terlaksana. apalagi kecukupan program serta keterlambatan penerapan program, sebab anggaran bisa digunakan selaku perlengkapan pengendalian bayaran, cuma bila seluruh pihak, paling utama manajer industri, terus dikoordinasikan serta berupaya buatmempertanggungjawabkan pencapaian sasaran yang diresmikan dalam anggaran.³⁴

D. Kesimpulan

1. Dengan penatausahaan Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah (APBD) Kota Tanjungbalai ialah bagian dari pengelolaan keuangan wilayah. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan anggaran pemasukan serta belanja wilayah di Kota Tanjungbalai, butuh disusun lembar pertanggungjawaban penerapan APBD yang wajib dimaknai selaku

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

bagian dari pengelolaan keuangan wilayah sekaligus bagian dari proses anggaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban penerapan APBD ialah bentuk kewajiban pemerintah wilayah buat menyelenggarakan pengelolaan keuangan wilayah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, murah, selektif, serta transparan, berwawasan rasa keadilan, serta konformitas. Ada pula kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) Kota Tanjungbalai, bila dalam merancang pengelolaan APBD butuh terlebih dulu menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 serta 295 Peraturan Menteri Dalam Negara. Nomor Pedoman Pengelolaan Keuangan Wilayah.

2. Dalam perihal ini hambatan kinerja keuangan Pemasukan Asli Wilayah pada Realisasi Anggaran di Kota Tanjungbalai kerap ada pada laporan Realisasi Anggaran pada APBD Kota Tanjungbalai, apabila ada tutorial teknis kerap tiba terlambat dari Pemerintah Pusat, yang jadi salah satu hambatan dalam penerapan pengelolaan keuangan wilayah. Ada pula perihal lain yang jadi hambatan merupakan Sumber Energi Manusia, dimana kerap kali karyawan yang dibutuhkan tidak ada. Setelah itu disebabkan minimnya SDM yang terdapat, sehingga SDM yang terdapat bisa mengerjakan lebih dari

satu pekerjaan. Fasilitas serta prasarana terhadap hambatan sumber energi kedua merupakan minimnya informasi infrastruktur dari bagian perencanaan. Infrastruktur yang kurang mencukupi pula jadi salah satu hambatan kinerja pelaporan realisasi anggaran di Kota Tanjungbalai, oleh karena jaringan menjadi hambatan untuk melakukan program *E-Planning* sesuai amanat pemerintah pusats.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Ngindana, Rispa, dkk, *APBD Partisipatif Sebuah Harapan Yang Terabaikan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012)

Rindawati, Septi, *Responsibilitas Pengelolaan APBD*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021)

Giant Permana, *Peran Dprd Kota Semarang Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, *Kota Tanjung Balai Dalam Angka 2022*, (Tanjungbalai: Rilis Grafika, 2022)

2. Jurnal

Saragih, Ridwan, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)

Rozi, Fahrul, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19*

Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh), (Vol. 2, No. 1 November 2020)

Sagara, Nanda, Bahmid, Pratiwi, Irda (2019). *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai)*. 1 (1)

Gani, Abdul, Perdana, Indra, (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*

Fahreza, Arfian, Ismail, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 3, No. 1 November 2021)

Asnelly, Rera, Martua, Junindra, *Efektivitas Pencatatan Identitas Anak Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai*, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 November 2020)

Siregar, Emiel Salim, *Jurnal : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Wawancara

Wawancara penulis dengan Usni Syahzuddin, S.Sos. selaku Sekretaris Dewan DPRD Kota Tanjungbalai, pada Tanggal 07 November 2022

5. Internet

<file:///D:/File%20downloads%20sis a/2022-4552-1-SM.pdf>

<https://biropbj.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/PAPARAN-PA-KPA-dan-PPK-dalam-Perpres-12-Th-2021-Fahrurrazi.pdf>